

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo terhadap kesadaran publik, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi pemerintah–masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei terhadap 72 responden yang dipilih melalui stratified proportional sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) untuk menguji hubungan antar variabel laten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesadaran Terhadap Kebijakan Publik (KTKP) dengan nilai koefisien $\beta = 0.370$ dan $p = 0.002$. Selanjutnya, Dampak Kebijakan juga berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat (PMs) dengan nilai $\beta = 0.257$ dan $p = 0.024$, serta terhadap Kolaborasi Pemerintah–Masyarakat (KPDMS) dengan nilai $\beta = 0.277$ dan $p = 0.026$. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan Tahura R. Soerjo tidak hanya secara langsung meningkatkan partisipasi dan kolaborasi, tetapi juga memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya konservasi. Kesadaran terbukti berperan sebagai mediator penting dalam model penelitian ini. Kesadaran memiliki pengaruh langsung terhadap Partisipasi Masyarakat ($\beta = 0.423$; $p < 0.001$) serta terhadap Kolaborasi Pemerintah–Masyarakat ($\beta = 0.287$; $p = 0.023$). Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci yang mampu memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan konservasi di kawasan Tahura. Nilai R^2 juga mendukung temuan ini, dengan kontribusi sebesar 13.7% pada variabel Kesadaran (KTKP) dan 21.8% pada variabel Kolaborasi (KPDMS). Sementara itu, kovariansi residual antara Partisipasi dan Kolaborasi (0.443; $p < 0.001$) menunjukkan adanya pengaruh faktor eksternal lain di luar model penelitian yang turut berperan.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Tahura yang baik mampu meningkatkan kesadaran publik, yang selanjutnya berimplikasi positif terhadap partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Hasil ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan konservasi yang bersifat holistik, inklusif, dan partisipatif, dengan dukungan zonasi yang jelas, penguatan kelembagaan, serta sinergi antar aktor. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya integrasi kearifan lokal dengan norma internasional (CBD, SDGs, Paris Agreement) serta pengembangan ekowisata berbasis komunitas sebagai strategi ganda yang mendukung keberlanjutan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat tata kelola konservasi berbasis partisipasi masyarakat, serta mendorong model pengelolaan kawasan konservasi lain di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi.

Kata kunci : Tahura R. Soerjo; kebijakan konservasi; partisipasi masyarakat; kolaborasi multi-pihak; ekowisata berkelanjutan.